

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna memberikan pelayanan publik, pemerintah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Disdukcapil) berupaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 menyatakan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor publik¹. Identitas ini diberikan kepada seluruh penduduk sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Wujud nyata dari tertib administrasi kependudukan yang dilaksanakan melalui penertiban dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan Pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk diantaranya seperti kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) untuk orang yang sudah berumur 17 tahun ke atas yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama dalam beraktivitas, seperti dijadikannya persyaratan administratif untuk mendapatkan bentuk layanan tertentu. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelayanan publik, untuk kategori anak-anak karena mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama menimbang identitas anak yang diberikan melalui kepemilikan Akta Kelahiran hanya menunjukkan legalitas seorang anak dilahirkan dari orang tua dan sebagai warga negara.

¹Rispati Ningsih, “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. KIA ini diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak².

Kartu Identitas Anak disingkat KIA adalah identitas resmi bagi anak yang berusia 0-17 tahun kurang satu hari dan belum menikah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota³. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional anak dalam rangka peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dari itu perlunya pemberian kartu identitas kependudukan khususnya bagi anak yang berusia 0-17 tahun kurang satu hari dan belum menikah, sedangkan anak dengan sampai usia 18 tahun telah memiliki identitas diri berupa E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk), KIA dalam hal ini sebagai bentuk identitas diri seorang anak yang berlaku secara nasional, setelah identitas yang berupa akta kelahiran.



Gambar 1.1 Bentuk Fisik Kartu Identitas Anak (KIA)

“AsriBuding Buding” *Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul Whatsapp (Pak tuwa) dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume XII, Edisi Spesial (1) Desember 2020. Mei 2021 diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

³Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat (7).

Sumber :Suarasurabaya.com

Fungsi KIA untuk kedua kelompok usia ini sebenarnya sama, hanya saja isi yang terdapat di kartu memiliki sedikit perbedaan. KIA untuk anak usia 0-5 tahun tidak menampilkan foto, tetapi KIA untuk usia 5-17 tahun memakai foto layaknya KTP. Bedanya KIA dengan KTP adalah tidak terdapatnya chip elektronik pada KIA. Nanti ketika anak berusia 17 tahun, KIA akan secara otomatis diubah menjadi KTP⁴.

Tujuan penerbitan kebijakan KIA adalah mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Selain itu peraturan ini juga diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional⁵.

Tidak hanya sebagai data penduduk, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, KIA juga memiliki banyak manfaat bagi anak, diantaranya digunakan untuk keperluan persyaratan mendaftar sekolah dan sebagai syarat mengurus perbankan bila anak ingin memiliki tabungan sendiri. Selain itu, KIA juga digunakan sebagai syarat mendaftar BPJS serta mengurus klaim asuransi. KIA juga dapat digunakan dalam pengurusan imigrasi dan juga mencegah perdagangan anak.⁶

Kabupaten Muaro Jambi merupakan satu diantara 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi yang sudah melaksanakan program kependudukan KIA sejak awal tahun 2019 bersama 3 kabupaten lain yakni kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Timur

⁴Sulastini “Implementasi Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Lombok Timur” JURIDICA - Volume 2, Nomor 2, Mei 2021, diakses pada tanggal 20 Desember 2021

⁵Untung Sri Hardjanto “Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang” Administrative Law & Governance Journal. Vol 2 Issue 2, June 2019, diakses pada tanggal 1 Februari 2022

⁶Tempo.co, “Kartu Identitas Anak untuk Si Kecil, Cek Manfaat dan Persyaratan” diakses dari <https://gaya.tempo.co/read/1546324/kartu-identitas-anak-untuk-si-kecil-cek-manfaat-dan-persyaratan/full&view=ok> pada tanggal 10 Maret 2022

dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun sejak ditetapkan program Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2019, sampai pada tahun 2020 pelaksanaannya dipandang tidak begitu optimal. Data seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jambi yang menjadi Pelaksana Program Penertiban KIA pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Kepemilikan KIA di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan KIA					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jambi Luar Kota	8.177	9.829	10.660	4.898	15.591	20.489
2	Sekernan	5.470	7.235	7.631	4.358	10.508	14.866
3	Kumpeh	2.885	3.589	3.900	2.014	5.475	7.489
4	Muaro Sebo	1.887	3.146	3.389	2.958	3.577	6.535
5	Mestong	5.213	5.621	6.148	1.821	9.948	11.769
6	Kumpeh Ulu	6.522	9.153	9.578	6.052	12.679	18.731
7	Sungai Bahar	2.563	4.245	4.515	3.851	4.909	8.760
8	Sungai Gelam	6.515	10.380	11.229	9.124	12.485	21.609
9	Bahar Utara	1.103	1.871	2.075	1.871	2.075	3.946
10	Bahar Selatan	1.034	2.474	2.757	3.307	1.924	5.231
11	Taman Rajo	1.308	2.050	2.110	1.580	2.580	4.160
	Jumlah	42.667	59.593	63.992	41.834	81.751	123.585

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Muaro Jambi

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KIA di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2017 sampai 2022 cenderung mengalami peningkatan. Penerbitan KIA diprioritaskan diberikan kepada anak-anak Sekolah Dasar (SD) sederajat, dan siswa/siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) se-Kabupaten Muaro Jambi. Hal inilah yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian program KIA di Kabupaten Muaro Jambi, dimana ada faktor-faktor yang menyebabkan dalam implementasinya belum maksimal dibandingkan dengan kabupaten yang baru melaksanakan Program KIA di tahun 2020 maupun yang telah melaksanakan di tahun sebelumnya, peneliti ingin mencari tahu

apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Agar Muaro Jambi dapat memaksimalkan implementasi KIA.

Ada beberapa upaya ditempuh oleh pihak Kantor Disdukcapil Kabupaten Muaro Jambi dalam mensosialisasikan KIA ini dengan meminta langsung partisipasi pimpinan sekolah juga pelibatan aktif aparatur perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat di Desa/Kelurahan,serta pihak aparatur Pemerintah⁷. Namun pada pelaksanaan kebijakan terutama dalam penyebaran informasi tentang Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah ataupun dinas terkait belum memaksimalkan sosialisasi pada masyarakat luas. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, sosialisasi akan kebijakan KIA sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat dan bahkan para orang tua pun belum mengetahui apa manfaat KIA. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan kebijakan pemerintah.

Maka daripada itu Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik dituntut berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat secara berkala agar mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan program KIA. Berdasarkan penjelasan yang telah digambarkan maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kebijakan pada program KIA mengkaji lebih dalam pada pelaksanaan, kendala yang dihadapi dan upaya dalam mengatasi masalah yang dihadapi dilapangan.

Guna mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian, penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai salah satu acuan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulunya antara lain sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Windi Dwi Arista, Tahun 2019 dalam jurnal yang berjudul ‘Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di

⁷Wartanews.co, “2020, Dinas Dukcapil Pemkab Muaro Jambi Targetkan 25 Ribu KIA Selesai”, di akses dari <https://wartanews.co/2020-dinas-dukcapil-pemkab-muaro-jambi-targetkan-25-ribu-kia-selesai/> pada tanggal 10 Maret 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung”. Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Peneliti menggunakan model implementasi Edward III yang dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya Kebijakan KIA terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA⁸.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suhardi Mukhlis, Ferizone, Heni Ismayati pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Kartu Identitas Anak di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Peneliti menggunakan model implementasi Edward III yang dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program Kartu Identitas Anak tidak berjalan dengan baik karena terdapat kendala dalam beberapa hal seperti proses transmisi yang belum maksimal⁹.

Adapun dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan dua penelitian diatas yaitu sama-sama membahas mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

⁸Windi Dwi Arista, *‘Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung’* Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3, Nomor 1, Februari 2019 diakses pada tanggal 24 Desember 2021

⁹Suhardi Mukhlis, Ferizone, Heni Ismayati, *“Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan”*. Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji) Stisipol Raja Haji TanjungPinang Vol. 3 Nomor. 1 Agustus 2021 diakses pada tanggal 24 Desember 2021

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah dalam pengambilan objek. Dalam penelitian ini mengambil objek Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan penelitian Wind iDwi Arista Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Suhardi Mukhlis, Ferizone, Heni Ismayati di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Kemudian dari teori yang digunakan dalam kedua penelitian terdahulu sama yaitu menggunakan teori Edward III , yang akan saya gunakan juga dalam penelitian ini.

Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas. Penulis akan meneliti dengan objek penelitian **“Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakanprogramKartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakanprogram Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritik maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menjadi bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangsi pemikiran dan bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi serta dapat menjadi bahan untuk memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan KIA.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dalam memaksimalkan implemntasi program KIA.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan informasi pelaksanaan kebijakan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi
- c. Bagi masyarakat Muaro Jambi penelitian diharapkan mampu menggambarkan pentingnya KIA.

1.5 Landasan Teori

Teori menjadi merupakan payung penulis dalam menganalisis masalah yang ditemukan di lapangan. Sejumlah teori akan mendeskripsikan indikator dan mengidentifikasi masalah serta alat untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan variabel dan topik penulisan. Berikut teori yang penulis gunakan:

1.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat dengan tujuan tertentu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Kebijakan publik meliputi segala

sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Thomas R Dye dalam Riant Nugroho, membererikan penegrtian sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu¹⁰.

Menurut Irfan Islamy mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu¹¹:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan tindakan pemerintah
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu

¹⁰Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014) hlm 126.

¹¹Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara 2003), hlm 20.

4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menurut Carl I. Friedrich dalam Riant Nugroho kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Artinya sebuah kebijakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok tertentu dalam pelaksanaannya ada hambatan namun harus tetap mencari peluang untuk menjalankannya. Kebijakan yang harus sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat agar mudah dalam proses implementasinya¹².

Artinya sebuah kebijakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok tertentu dalam pelaksanaannya ada hambatan namun harus tetap mencari peluang untuk menjalankannya. Kebijakan yang harus sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat agar mudah dalam proses implementasinya.

Sedangkan Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibatakibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentukbentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah¹³.

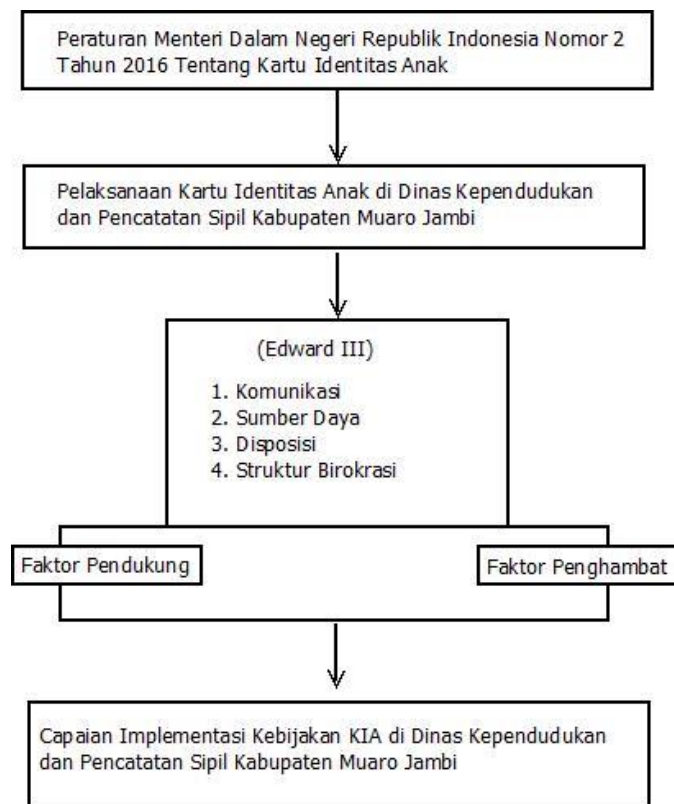
1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program serta faktor pendukung dan

¹²Riant Nugroho, *Op Cit*

¹³Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2022), hlm 17.

penghambat dan pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.



Gambar 1.3 Kerangka Berpikir

1.7 Metode

Metode penelitian umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 2.

mendapatkan data guna menemukan hasil implementasi program KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi¹⁵.

Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif guna memberikan gambaran berdasarkan kondisi realitas implementasi program KIA pada fokus penelitian yang bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dan hasil pengamatan peneliti atau dari sumber lainnya.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk table, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

¹⁵*Ibid.* hlm. 9.

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Bukit Baling, Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 3638. Disdukcapil merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, termasuk dalam pelaksanaan program KIA. Kemudian penelitian juga akan dilakukan di beberapa Sekolah Dasar di ruang lingkup Kabupaten Muaro Jambi serta beberapa masyarakat/orang tua anak.

1.7.3 Fokus Penelitian

Masalah fenomena yang hendak diteliti harus sudah ditetapkan sejak awal meskipun kemungkinan terjadinya perubahan disebabkan faktor *rill* di lapangan. Masalah yang hendak diteliti kemudian perlu dipersempit, hal itu guna menentukan fokus penelitian¹⁶. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap implementasi kebijakan program KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam buku Lexy Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

¹⁶Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”, (Jakarta:Prenadamedia Group), Tahun 2014, hlm. 367.

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu:¹⁷

- a. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancari merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui Pencatatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.
- b. Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
- c. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasil foto sering dianalisis secara induktif.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahannya yang akan diteliti. Informasi ini menjadi kunci dalam suatu penelitian untuk dapat memecahkan suatu permasalahan.

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling* artinya, mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian¹⁸. Berdasarkan teknik tersebut, maka informan yang dianggap penting oleh peneliti sebagai sumber data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi	Sebagai Pimpinan yang mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan,

¹⁷Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2019

¹⁸*Ibid*, hlm 163.

		menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sebagai Bidang Pendaftaran Penduduk yang mencakup Pendataan Penduduk, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Pindah Datang dan KIA
3	Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	Sebagai Pemberi Layanan Informasi Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Melalui Papan Informasi Maupun Secara Lisan, serta Penyuluhan Pendaftaran Penduduk
5	Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Wilayah Muaro Jambi	Sebagai Instansi yang Menjadi Sasaran Dalam Pelaksanaan Program KIA
6	Orang Tua yang mengurus KIA dan belum mengurus KIA	Sebagai Masyarakat Yang Menerima Aturan Hukum Baru Mengenai Kebijakan KIA
7	Ombudsman Provinsi Jambi	Sebagai Pengawas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi Partisipatif

Observasi Partisipatif merupakan suatu proses atau cara dalam mengumpulkan data dimana peneliti dalam mengamati tingkah laku sebagai sesuatu yang berlangsung secara alami. Peneliti mencoba mengerti setiap situasi atau kondisi bersama informan/sumber informasi. Data dikumpulkan langsung dengan realitas yang sebenarnya¹⁹.

Observasi peneliti disini adalah melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan program KIA, kemudian mengumpulkan data distribusi dan penerbitan KIA di wilayah Kabupaten Muaro Jambi serta data di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

b. Wawancara

Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pengambilan sampel yang tertarik sebagai informasi kunci²⁰.

¹⁹Muri Yusuf, *Op Cit*, hlm 380.

²⁰Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Universitas Sebelas Maret, 2006, hlm. 70.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara semi terstruktur. Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam meneliti lapangan adalah draf yang berisi kisi-kisi wawancara, data dokumen dan bahan pustakayang akan diajukan kepada informan penelitian terkait implementasi kebijakan program KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan faktor yang dipengaruhi oleh teori Charles O. Jones dan Van Meter Van Horn.

Dari kegiatan wawancara proses selanjutnya memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk table, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk melihat hasil pelaksanaan program KIA dilihat dari efektivitas serta faktor pendukung dan penghambat capaian target penerbitan dari pelaksanaan program KIA di Kabupaten Muaro Jambi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak selalu berurutan, tetapi dapat berkembang sesuai bidang permasalahan sehingga peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam (*deep interview*).

c. Dokumentasi

Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti menggunakan dokumen dan *record* untuk keperluan penelitian, menurut Guba dan Lincoln, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti berikut ini:

1. Dokumentasi dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
3. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

4. *Record* relative murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
5. Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
6. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lainnya seperti foto, video, koran, majalah, yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dokumentasi yang dimaksud berupa foto rekaman, video, catatan hasil wawancara serta data sekunder sebagai data pendukung yang berasal dari dokumen yang ada pada kantor Disdukcapil Kabupaten Muaro Jambi seperti:

1. Dokumen
2. Rekapitulasi pencetakan KIA Per Semester tahun 2019, 2020 dan 2021
3. Data struktur birokrasi Disdukcapil Kabupaten Muaro Jambi
4. Dokumen data kependudukan dan data anak usia 0-17 tahun
5. Dokumentasi saat melakukan wawancara

1.7.7 Teknik Analisis Data

Data Model analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut²¹.

a. Reduksi data

Mereduksi data sama hal dengan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok yang menjadi fokusnya, mencari tema dan polanya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Kegiatan

²¹Sugiyono, *Op Cit.* hlm 247.

reduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data

b. Penyajian Data

Penyajian data, peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan kategori. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan pekerjaan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum turun lapangan. Kesimpulan awal ini bersifat sementara, dan akan berubah apabila pada saat turun lapangan tidak mendapatkan bukti-bukti yang mendukung data sebelumnya. Disinilah diperlukan verifikasi setelah penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memperkuat data sebelumnya dan dapat membuktikan kebenaran dari penarikan kesimpulan data sehingga lebih kredibel.

1.7.8 Triangulasi Data

Triangulasi diartikan sebagai pengujian data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagi sumber data. Teknik pengumpulan data, peneliti akan menganalisis beragam data primer maupun sekunder untuk mendapatkan hasil yang valid dan kredibel. Terdapat empat tipe triangulasi²².

1. Triangulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian.

²²*Ibid.* hlm. 125

2. Triangulasi Penulis, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam dalam suatu penelitian.
3. Triangulasi Teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.
4. Triangulasi Teknik Metodologis, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.